

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN KOTA
LAMA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2017 - 2018**

Oleh: Minarti Hutahaean

Email: hutahaean.minar@gmail.com

Dosen pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problem of poverty in Indonesia is a challenge faced by the government from time to time, poverty is a complex problem and requires special handling and programs. One of the government programs to accelerate poverty reduction is a family of hope program, issued based on presidential regulation No. 15 of 2010 Concerning the acceleration of poverty reduction. Kota Lama sub-district Kunto Darussalam district Rokan Hulu regency is one of the villages that has quite a number of KPM which is 175 KPM, but the poverty rate in the Kota Lama village is still increasing.

The purpose of this study was to determine the implementation of the family hope program activities in the Kota Lama village and to determine the factors that influence the implementation of the family of hope program (PKH) in the Kota Lama village. The concept of the theory that I use is the implementation of policies according to Van Metter and Van Horn. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In data collection, the writer uses interview and documentation techniques.

The results of the author's research is the implementation of the family of hope program in the Kota Lama village has not been running effectively. The result of this study can be seen from the six indicators of successful implementation, the first the size and objectives of the policy are still not in accordance with established standards, namely the objectives of the policy are still not on target. Second, there are still constraints on financial resources, namely the need for additional sources of funds and time resources that often experience delays in the distribution of aid funds. Third, the characteristics of the program implementing agents are running well. Fourth, the communication delivered by the implementor has not been maximized, namely socialization to the community about the family hope program that has not gone well so that the public does not fully know about this program. Fifth, the disposition of the implementor's response from the implementing officer was very positive. Sixth, supportive social, political, and economic environment in the implementation of the family of hope program.

Keywords: Program implementation, Hope Family Program (PKH).

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin di seluruh Indonesia. PKH adalah program prioritas nasional berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kota Lama ini yang menjadi sasaran utama adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan yaitu ibu hamil, ibu menyusui, memiliki balita dan anak usia sekolah setingkat SD/MI, dan SMP/MTs. Berdasarkan peraturan perundang-undangan PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No.40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro Rakyat, dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 tersebut, PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) (2016:14) Kemensos RI, tujuan khusus dari PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.
3. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun.
4. Meningkatkan kondisi social ekonomi RTSM.

Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas berat).

- **Komponen Pendidikan**
Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/Mi sederajat, SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- **Komponen kesehatan**
Adalah anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- **Komponen kesejahteraan Sosial**

Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas.

Tabel 1.1
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah KPM
2014	3.764
2015	1.103
2017	2.421
2018	7.148
Total	14.436

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 total KPM PKH di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 14.436 KPM Tahun 2018. Namun total KPM eligible (yang ada komponen) hanya 11.656 KPM. Sehingga terdapat selisih yang cukup banyak KPM yang tidak eligible.

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kecamatan Kunto Darussalam. Kecamatan Kunto Darussalam terdiri dari 13 desa/kelurahan. Salah satu desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam adalah Kelurahan Kota Lama.

Kelurahan Kota Lama merupakan kelurahan dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak dan jumlah penerima KPM terbanyak juga. Hal ini tentu menjadi permasalahan dimana seharusnya dengan banyaknya KPM di Kelurahan Kota Lama seharusnya tingkat kemiskinan dapat berkurang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama.

Kelurahan Kota Lama merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Kunto Darussalam. Sehingga Kelurahan Kota Lama

merupakan barometer dalam mengukur keberhasilan suatu program untuk kelurahan/desa yang berada dalam wilayah kecamatan Kunto Darussalam.

Berdasarkan survei di lapangan, dapat diketahui beberapa fenomena dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu 2017-2018 di Kelurahan Kota Lama :

1. Kelurahan Kota Lama merupakan penerima manfaat PKH terbanyak di Kecamatan Kunto Darussalam
2. Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Kota Lama pada periode 2017 – 2018 mengalami kenaikan sebesar 10 persen.
3. Masalah validasi data sehingga sasaran dari kebijakan masih belum tepat karena masih ditemui ada masyarakat yang tidak masuk kriteria dan juga ada masyarakat yang masuk kriteria tapi tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.
4. Keterlambatan dalam melakukan pencairan dana, pencairan yang dilakukan biasanya mundur satu bulan sampai 2 bulan dari waktu pencairan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 - 2018.”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kota Lama ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kota Lama ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2018.

Kerangka Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan perbedaan dapat muncul antara pernyataan kebijakan (*policy statement*) dengan hasil kebijakan (*policy outputs*). Mungkin persoalannya lahir dari dampak kebijakan. Dampak kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak, keluar dari implementasi kebijakan (Santosa, 2008:43).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabtier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan

bahwa, “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian. (Solichin Abdul Wahab, 2016 : 135).

Model yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model Of The Policy implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. (Agustino, 2008:144).

Menurut Van Meter Donald Van Metter dan Carl Van Horn, dalam Agustino (2008) ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, disposisi pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kelurahan Kota Lama

Kelurahan Kota Lama merupakan salah satu kelurahan dari 6 (enam) kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah timur kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kelurahan Kota Lama + 34.270 km yang terdiri dari 2 lingkungan dan 16 Rukun Warga (RW) dan 90 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Kota Lama memiliki jumlah penduduk 17.561 jiwa dengan klasifikasi laki-laki 9.143 jiwa dan perempuan 8.418 jiwa.

2. Definisi Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna mengurangi angka

kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin di seluruh Indonesia. PKH adalah program prioritas nasional berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas berat), dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen kesehatan : ibu hamil/menyusui. Anak berusia nol sampai dengan 6 tahun.
2. Komponen pendidikan : anak SD/MI/Sederajat. Anak SMP/MTs/Sederajat dan anak SMA/MA sederajat.
3. Komponen kesejahteraan sosial : lanjut usia 70 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas berat.

3. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 – 2018.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau ukuran kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berada dibawah Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik dipusat maupun daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Latar Belakang diadakannya Program Keluarga Harapan ini adalah untuk membangun sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementrian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail.

Ketepatan tujuan dalam kebijakan program ini adalah penuntasan kemiskinan dengan ukuran yang dipakai berdasarkan dari tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sehingga sangat penting untuk merumuskan kebijakan melalui proses yang demokratis agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap – tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Banyaknya staff tidak otomatis mendorong implementasi berjalan secara baik, hal mendasar yang perlu diketahui adalah kecakapan staff dalam bekerja yang perlu diperhatikan. Keterbatasan SDM juga akan menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi kualitas SDM yang baik dapat menentukan keberhasilan dari suatu program termasuk PKH yang ada di Kelurahan Kota Lama.

sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama masih terdapat kendala pada sumber daya finansial yaitu perlu adanya penambahan sumber dana, dan sumber daya waktu yang sering mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari agen pelaksana. Dalam penelitian ini pemerintah Kelurahan Kota Lama harus mendukung adanya Program Keluarga Harapan. Selain itu aktor yang meliputi perangkat desa, di bidang pendidikan yaitu guru/wali kelas yang harus melakukan absensi rutin agar partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat terpantau.

Bidang kesehatan yaitu bidan kelurahan yang berada di lokasi peserta PKH menetap. Perwakilan bidan kelurahan harus selalu memantau perkembangan kondisi kesehatan dan gizi dari ibu hamil, ibu nifas, dan balita ketika melakukan posyandu. Dengan adanya partisipasi dari pihak-pihak terkait maka program ini akan berjalan dengan baik. Karena itu dukungan dari berbagai aktor inilah yang diharapkan nantinya akan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup RTSM.

Agen pelaksana di kelurahan kota lama adalah pendamping sosial, dimana pendampingan PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Sebagaimana diketahui bahwa para pejabat dalam birokrasi publik adalah implementor yang paling umum, dan adalah paling penting dimana dipahami beberapa dari pengaruh khusus dalam disposisinya atau sikapnya. Persaingan untuk kepentingan kebijakan implementor mungkin merintangai upaya-upaya implementasi. Kadang para implementor secara selektif menerima berbagai perintah yang mereka terima dan namun demikian mengabaikan perintah yang tidak sama dan sebangun dengan disposisi kebijakannya.

e. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha proses implementasi,

maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pelaksana PKH Kecamatan bertanggung jawab kepada Pelaksana PKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat. Tugas dan tanggung Pendamping PKH atau Pelaksana PKH Kecamatan secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada Keluarga Manfaat peserta PKH. Wilayah kerjanya meliputi seluruh desa/kelurahan dalam satuan wilayah kerja di Kecamatan. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Kota Lama pihak pendamping PKH selalu berkoordinasi kepada aparat kelurahan dan kecamatan agar kelangsungan jalannya kegiatan PKH lancar dan efektif supaya terhindar dari kekeliruan. pelaksana Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan seluruh pendamping melalui rakor rutin bulanan dengan seluruh pendamping PKH. Di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, kegiatan koordinasi dan sosialisasi berjalan cukup baik.

f. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Lingkungan kebijakan yang kondusif tentu akan menciptakan kondisi yang memungkinkan implementasi untuk dapat berhasil. Sebaliknya lingkungan kebijakan yang buruk justru akan membuat implementasi kebijakan akan menjadi terhambat atau gagal sama sekali.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah pencapaian sebuah target. Dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan dari pendamping berkaitan dengan hal tersebut target yang harus dicapai dalam Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Sampai saat ini pelaksanaan PKH di Kelurahan Kota Lama mulai dari pertama pelaksanaan program telah terdapat peningkatan mulai dari status pendidikan dan status peningkatan gizi ibu hamil dan balita.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu target dalam pelaksanaan PKH ini. Untuk meningkatkan partisipasi para peserta program yaitu dengan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar bagi peserta didik dan meningkatkan partisipasi kesehatan bagi para ibu hamil dan balita dengan memeriksakan keadaan kesehatannya di posyandu maupun bidan desa. Jika partisipasi masyarakat tinggi maka secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu dengan adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PKH ini akan dapat meningkatkan pembangunan yang pada akhirnya dapat mensejahterahkan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 – 2018

1. Validasi Data

Dalam menentukan penerima bantuan PKH, pihak dari pensensusan penduduk melakukan pendataan tentang masyarakat miskin Pelaksanaan PKH ini, penerima bantuan PKH diambil dari badan pusat statistic. Para pendamping hanya melakukan survey kembali kepada calon penerima bantuan PKH.

Permasalahan ketidak tepat sasaran penerima bantuan PKH pada umumnya terletak pada pendataan atau sumber datanya tidak valid atau *margins error*. Oleh sebab itu masih ada kekeliruan

tentang penetapan masyarakat penerima bantuan PKH.

2. Kendala Teknis

Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mengenai bantuan yang tidak yang keluar dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai yang diberikan pemerintah setiap triwulan.

3. Tingkat Dukungan Masyarakat

Karakteristik kelompok sasaran akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan memiliki pemahaman lebih baik tentang tujuan program sekaligus memberikan input.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Masyarakat seharusnya mengetahui implementasi program PKH dengan lebih baik, dengan tujuan program menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

4. Sosialisasi

Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses implementasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai proses partisipatif dan kurangnya informasi mengenai tahapan kedua kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan pendamping PKH tidak intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Karena kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrol pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari enam indikator keberhasilan implementasi yaitu yang pertama, standar, tujuan, dan sasaran kebijakan belum sesuai dengan standar, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Kedua, masih terdapat kendala pada sumber daya finansial yaitu perlu adanya penambahan sumber dana, dan sumber daya waktu yang sering mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan. Ketiga, Karakteristik Agen Pelaksana Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang disampaikan implementor sudah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya sosialisasi yang dilakukan. Keenam, lingkungan sosial respon positif yang diberikan oleh masyarakat Kelurahan Kota Lama, Lingkungan Politik kurangnya tingkat dukungan dari pemerintah Kelurahan Kota Lama
2. Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan PKH di Kelurahan Kota Lama. *Pertama*, mengenai data yang tidak akurat atau *margins error*, sehingga menyebabkan banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, *kedua* pendamping PKH yang tidak intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup, dan kurangnya komitmen keluarga penerima manfaat untuk menjalankan kewajibannya sehingga tujuan dari program keluarga harapan tidak terlaksana dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pemberian bantuan perlu mempertajam focus kelompok sasaran Program Keluarga Harapan dengan mempertajam focus sasaran ini, maka yang diharapkan adalah upaya-upaya pengentasan masyarakat miskin benar-benar dapat terarah, dan menjangkau lapisan masyarakat yang berada di tingkat paling rentan. Dalam hal ini perlu adanya peran aktif pemerintah yang mana diwakili oleh Dinas Sosial dalam menentukan sumber data targeting.
2. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai tujuan program PKH.
3. Pendamping PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat agar pelaksanaan program tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika
- Agustino Leo. 2008 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Asra Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit In Media.

- Bryant Coralie. 1989. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Bungin Burhan, 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta:Kencana.
- Gaffar Afan. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Jones Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Tangklisan, Hessel Nogi. *Kebijakan dan manajemen Otonomi Daerah*. Jakarta: Lukman Offset.
- Wahab Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Skripsi dan Jurnal:

- Aula, Faisal. 2017. *Pelaksanaan Program Elektronik Warong Kube Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.
- Saputra, Taufik Widiya. 2016. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di DesaPasarbaru Pangean Dalam Menuntaskan Kemiskinan di Kecamatan Pangean*. Universitas Riau.
- Dadan Hidayana. 2009. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Institut Pertanian, Bogor.

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin.
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10
Tahun 2007 tentang Program Keluarga
Harapan.
Pedoman Umum Program Keluarga
Harapan Tahun 2018.